***GOOD INFORMATION GOOVERNACE* DI BIDANG KECIPTAKARYAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**Yuyus Nor Rahman**

1. Marsuq, S.Sos, M.Si dan Wesley Liano Hutasoit, S.Sos, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ilmu Administrasi Negara

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui pelaksanaan Good Information Governance dibidang Keciptakaryaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan melakukan pengumpulan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan Good Information Governance dibidang Keciptakaryaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu berjalan dengan sejumlah kekurangan dan dapat dikatakan belum optimal hal ini ditandai dengan hasil penelitian yang menunjukkan sistem informasi manajemen Keciptakaryaan Kabupaten Mahakam Ulu masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki khususnya manajemen yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan dari SDM khususnya yang bekerja pada bidang keciptakaryaan. Kepatuhan terhadap adanya risiko dimulai dari perencanaan awal suatu proyek dapat di rencanakan sesuai dengan kebutuhan daerah hal ini bertujuan agar terjadi pemerataan dalam pembangunan dan menghindari risiko konflik yang dapat muncul. Terdapat beberapa petugas yang bertugas membagikan informasi yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembina teknis kegiatan (PPK) yang menerima dan menjalankan tugas dari kepala Dinas hal ini disesuaikan dengan aturan PUPR. Harus ada pemeriksaan rutin atas informasi apa yang dipertahankan, pemangkasan data lama akan mengurangi biaya yang diperlukan untuk menyimpannya dan menghapus atau mengarsipkan konten setelah habis masa pakainya juga harus didorong. Kemudian pada indikator Bersih (Clean) menunjukkan bahwa untuk informasi SPPIP maupun RPKPP dilakukan di upgrade atau di perbarui setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapat informasi SPPIP maupun RPKPP melalui informasi online. Kemudian ada pemeriksaan rutin yang dilakukan yang bertujuan untuk mencegah potensi dan permasalahan pembangunan pemukiman dan infrastruktur oleh pihak terkait. Kemudian kontrol yang diberikan tidak dapat berlaku secara efektif karena pemahaman individu atau kapasitas SDM masih rendah kemudian dibatasi oleh media informasi yang sangat minim oleh karena itu peningkatan infrastruktur informasi mesti ditingkatkan.

Kata Kunci: Good Information Governance, Keciptakaryaan, Pekerjaan Umum

1. **PENDAHULUAN**

Pembangunan Daerah adalah suatu usaha yang sistematik dari berbagai pemangku kepentingan baik umum, pemerintah dan swasta selain itu juga melibatkan kelompok masyarakat atau LSM pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi, dan aspek lingkungan sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pendapatan daerah yang dimanfaatkan guna pembangunan infrastruktur yang masih sangat bergantung dari dana transfer. Perencanaan pembangunan daerah melibatkan fungsi yang sangat penting dan strategis karena dengan perencanaan maka ada gambaran untuk melihat daerah dimasa yang akan datang dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya alam dan manusia yang ada. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid, dan akuntabel.

Perencanaan pembangunan daerah ini didasarkan pada data dan informasi. Untuk mendukung perencanaan pembangunan yang baik sistem informasi pembangunan daerah ini siap membantu badan, dinas, atau instansi pemerintah untuk memudahkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang difokuskan kepada pemanfaatan informasi yang dihasilkan berdasarkan pengolahan data yang telah diperoleh pemerintah daerah dengan cepat, mudah, dan akurat.

Dalam rangka pencapaian sasaran yang hendak dicapai oleh berbagai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah maupun kota itu dapat terwujudnya maka sasaran diarahkan pada sarana dan Prasarana Perkotaan Yang Berkualitas dan memadahi menyesuaiannya dengan rencana strategis kementerian Pekerjaan Umum kemudian disesuaikan dengan bidang tugas Dinas Permukiman dan Prasarana diberbagai kabupaten atau kota.

Dinas Pekerjaan Umum sebaiknya memperhatikan garis umum kebijakan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya. Dilanjutkan dengan merumuskan misi dan menetapkan tujuan, serta sasaran, sehingga terbentuknya rencana yang efektif dan efesien yang memenuhi elemen- elemen yang diharuskan yaitu adanya visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan (Kusuma dkk, 2018).

Program-program yang disusun Dinas Pekerjaan Umum merupakan program prioritas pembangunan yang berhubungan dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten atau Kota. Berbagai program yang dicanangkan disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan tiap tahun oleh karena itu hasil pembangunan dapat terukur perkembangannya sampai akhir periode rencana strategis.

Pencapaian target indicator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk masing-masing program. Program-program pemerintah saat ini pada dasarnya hanyalah melanjutkan program-program pemerintah di masa lalu yang belum selesai dikerjakan ataupun belum dilaksanakan dengan maksimal karena masalah kekurangan dana anggaran yang terbatas ataupun karena tidak mendapatkan prioritas utama dalam pelaksanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dulu bernama Kementerian Pekerjaan Umum). Pekerjaan Umum memiliki banyak masalah di dalam pelaksanaan program-program yang mereka telah susun, tentunya ini bukan hanya sekedar mengenai anggaran yang tidak mencukupi namun juga faktor-faktor lingkungan, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, hubungan dengan pemerintah pusat dan daerah. Tentunya ini menjadi tantangan bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terutama dengan adanya perubahan program dan perubahan era yang menuntut segalanya serba digital dan berbasis data informasi.

Manajemen dan organisasi informasi yang efektif berkontribusi pada Good Information Governance dengan membuat informasi lebih mudah diakses dan, secara bersamaan, persyaratan tata kelola informasi memberikan insentif yang baik bagi organisasi untuk mengelola informasinya dengan baik. Jika informasi dan data dikelola dan diorganisasi dengan baik, lebih mudah untuk mengambil untuk tata kelola informasi dan tujuan kepatuhan (Dunne-Howrie, 2019).

Penelitian terdahulu terkait cipta karya dan memiliki relevansi dengan Good Information Governance yaitu penelitianSumarna Putera (2016), Pada bagian kepegawaian Pekerjaan Umum Cipta Karya dalam pelaksanaan beberapa kegiatannya sudah terkomputerisasi sebatas penggunaan aplikasi Microsoft Word dan Excel, namun banyaknya pengolahan data kepegawaian yang ada masih terpisah-pisah antara satu data dengan data yang lainnya membuat staf pengolah data kesulitan dalam mengolah data kepegawaian yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan penguasaan staf pengolah data menggunakan software Microsoft Office. Permasalahan tersebut mengakibatkan informasi mengenai pegawai mutasi, pendidikan dan pelatihan serta DUK (Daftar Urut Kepangkatan) baik dalam bentuk laporan bulanan maupun laporan tahunan menjadi tidak akurat dan harus direvisi berulang.

Irmayani (2016) berdasarkan analisis ditemukan bahwa Dinas Cipta Karya di daerah belum memiliki bidang khusus untuk menangani SI/TI. Sehingga tidak adanya roadmap maupun blueprint yang jelas dan pasti dalam pembangunan SI/TI. Dengan adanya penambahan bidang teknologi informasi dalam Dinas Cipta Karya maka mulai dari perencanaan, pengembangan, penerapan dan pengawasan SI/TI lebih efektif dan efisien. Dengan begitu akan berdampak pada kinerja instansi yang efektif dan efisien organisasi.

Penelitian saat memiliki perbedaan karena konsep menjadi dasar penelitian masih terbatas dalam hal referensi dan penelitian meskipun memiliki pembahasan yang sama terkait bidang keciptakaryaan namun penelitian ini mengkaji dari konsep Good Information Governance dengan menggunakan indikator Audit, Prioritaskan (Prioritise), Penentuan (Define), Bersih (Clean), Kontrol (Control).

Berdasarkan permasalahan dan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “*Good Information Governance* dibidang Keciptakaryaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu”

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan *Good Information Governance* dibidang Keciptakaryaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu?

 **II. KERANGKA KONSEP DAN TEORI**

* + 1. **Sistem informasi Manajemen**
	1. Menurut Husein dan Wibowo (2012:5) sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendristribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut O’Brien (2002) dikemukakan bahwa bahwa SIM adalah suatu sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sedangkan Ladjamudin (2005:3) berpendapat sistem adalah merupakan kumpulan dari komponen atau elemen-elemen atau subsistem subsistem. Secara umum sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
		1. **Pembangunan Bidang Keciptakaryaan**

Dikemukakan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015-2019 pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan beberapa hal terkait dengan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, antara lain: tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia, serta meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah, dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar.

Adapun pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu membangun sistem, fasilitasi Pemerintah Daerah, serta pemberdayaan masyarakat. Melalui 3 (tiga) pendekatan tersebut, diharapkan target Gerakan Nasional 100-0-100 dapat tercapai.

**III. METODE PENELITIAN**

* 1. **Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, yang melibatkan pimpinan dan staf yang melaksanakan tugas terkait Sistem Informasi Manajemen di Bidang Keciptakaryaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

* 1. **Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2012:6)

* 1. **Subyek Penelitian**
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu
2. Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu
4. Staf Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu 4 Orang.
	1. **Teknik Pengumpulan data**
5. Wawancara
6. Observasi
7. Dokumentasi
	1. **Fokus Penelitian**
8. Audit
9. Prioritaskan (Prioritise)
10. Penentuan (Define)
11. Bersih (Clean)
12. Kontrol (Control)
	1. **Teknik Analisis Data**
13. *Data Reduction* (Reduksi Data).
14. *Data Display* (Penyajian Data).
15. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan/Verifikasi).

**IV .HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Deskripsi Wilayah Penelitian**

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395), yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pemekaran tersebut mencakup 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Long Bagun, Long Hubung, Laham, Long Apari, dan Kecamatan Long Pahangai. Geografis Kabupaten Mahakam Ulu terletak antara 113048’49” sampai dengan115045’49” Bujur Timur serta diantara 1031’05” Lintang Utara dan 0009’00” Lintang Selatan dengan luas sekitar 15.315 Km2 atau kurang lebih 7,26 persen dari luas Propinsi Kalimantan Timur, serta jumlah desa/kelurahan sebanyak 49 desa/kelurahan. Kabupaten Mahakam Ulu berbatasan dengan Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara) dan Negara Bagian Sarawak (Malaysia) di sisi utara, Kabupaten Kutai Kartanegara disisi timur, Kabupaten Kutai Barat di sisi selatan, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Murung Raya (Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), yang beribukota di Desa Ujoh Bilang yang terletak di Kecamatan Long Bagun. Kabupaten ini selama lima (5) tahun kedepan memprioritaskan pembangunan sektor transportasi dengan rencana membangun jalan yang akan menghubungkan antar kecamatan melalui pembangunan jalan dari Long Bagun ke Long Pahangai sepanjang 155 km dan ruas jalan dari Long Pahangai ke Long Apari sepanjang 98 km.

**4.2.Hasil Penelitian**

Untuk melihat pelaksanaan *Good Information Governance* dibidang Keciptakaryaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu maka penelitian ini akan mengkaji berdasarkan indikator Audit, Prioritaskan (Prioritise), Penentuan (Define), Bersih (Clean), Kontrol (Control) untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut.

1. **Audit**

Audit yang dimaksudkan adalah penggalian dan pemahaman tentang rentang informasi yang perlu dikelola terkait sistem informasi manajemen Keciptaryaan Kabupaten Mahakam Ulu. Sebelum membahas tentang pelaksanaan Good Information Governance dibidang Keciptakaryaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dari aspek Audit maka terlebih dahulu diuraikan mengenai sistem informasi manajemen Keciptaryaan Kabupaten Mahakam Ulu, hal ini dikemukakan oleh informan Kepala Bidang Cipta Karya yang mengatakan bahwa:

“Jika di lihat dari sisi Manajemen Pengaplikasian yang kurang efektif dalam bidang keciptakaryaan masih banyak yang perlu di perbaiki dan perlu di tingkatkan dari SDM khususnya yang bekerja pada bidang keciptakaryaan Kabupaten Mahakam Ulu”

(Hasil wawancara tanggal, 4 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sistem informasi manajemen Keciptakaryaan Kabupaten Mahakam Ulu masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki khususnya manajemen yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan dari SDM khususnya yang bekerja pada bidang keciptakaryaan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Sub Bagian Perencanaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang mengemukakan bahwa:

“Audit sejauh ini hanya pemberian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan sesuai atau tidak dengan standar akutansi yang berlaku di daerah khususnya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu”

(Hasil wawancara tanggal, 8 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa audit dilakukan untuk kepentingan pengetahuan mengenai kesesuaian antara laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di daerah.

1. **Prioritaskan (Prioritise)**

Organisasi perlu memprioritaskan informasi dan proses terkait penilaian tingkat risiko: risiko kepatuhan, risiko peraturan, dan risiko reputasi. Untuk kemudahan manajemen Keciptakaryaan Kabupaten Mahakam Ulu Prioritas dari sisi risiko kepatuhan dijelaskan oleh informan Kepala Sub Bagian Perencanaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang mengemukakan bahwa:

“Menurut pendapat kami ada banyak perubahan positif yang di diberikan dari pelaksanaan SPPIP dan RPKPP dalam pelaksanaan infrastruktur pembangunan contohnya perencanaan awal suatu proyek dapat di rencanakan sesuai dengan kebutuhan daerah kedepannya tidak akan menimbulkan persoalan-persoalan ketidakmeretaan pembangunan publik di berbagai desa di suatu wilayah tertentu”

(Hasil wawancara tanggal, 9 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kepatuhan terhadap adanya risiko dimulai dari perencanaan awal suatu proyek dapat di rencanakan sesuai dengan kebutuhan daerah hal ini bertujuan agar terjadi pemerataan dalam pembangunan dan menghindari risiko konflik yang dapat muncul.

Dari sisi risiko peraturan menekankan pada perlu perhatian informasi yang sajikan mempertimbangkan peraturan atau kebijakan hal ini dikemukakan oleh informan, Staf Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Bidang Cipta Karya yang mengatakan bahwa:

“SPPIP dan RPKPP telah dirumuskan dengan mempertimbangkan kebijakan dan strategi yang terdapat di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota hal ini penting untuk mengikuti perencanaan yang sesuai dengan arah pembangunan daerah”

(Hasil wawancara tanggal, 10 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa risiko peraturan yang dibuat dapat mengharuskan setiap program yang dirumuskan termasuk SPPIP dan RPKPP mempertimbangkan peraturan kebijakan dan strategi yang terdapat di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJMD dan RTRW. Selanjutnya dari sisi risiko reputasi dijelaskan oleh informan Kepala Sub Bagian Perencanaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang mengatakan bahwa:

“Resiko yang mungkin diterima dalam menampilkan setiap informasi SPPIP maupun RPKPP akan menimbulkan persoalan pemerintah daerah dalam proses pembangunan pemukiman dan infrastruktur dalam daerah salah satunya tidak meratanya pembangunan dalam setiap daerah atau desa di dalam wilayah pemerintahan”

(Hasil wawancara tanggal, 4 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat dipahami bahwa ada reputasi daerah yang dipertaruhkan apabila setiap informasi SPPIP maupun RPKPP tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan persoalan di daerah tentu akan mencerminkan kelemahan manajemen informasi yang ditangani pemerintah daerah.

1. **Penentuan (Define)**

Penentuan (Define) terkait apa yang perlu dijaga, untuk tujuan apa, karyawan mana yang perlu akses, dan untuk berapa lama. Informasi harus disimpan di tempat yang paling efektif dapat digunakan untuk menangani tujuan dan risiko terjadi dalam sistem Keciptakaryaan di Dinas PU, Kabupaten Mahakam Ulu.

Untuk memperolah penjelasan mengenai hal tersebut maka dilakukan wawancara dengan informan Kepala Sub Bagian Perencanaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang mengemukakan bahwa:

“Menjaga dokumen-dokumen yang bersifat rahasia namun dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah tersebar ke publik atau masyarakat luas agar tidak menimbulkan berita simpang siur antara pakta dan opini yang terjadi dalam penyelenggaraan pembangunan”

(Hasil wawancara tanggal, 10 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hal yang diperhatikan terkait penentuan (*define*) adalah segala hal yang perlu dijaga adalah dokumen yang bersifat rahasia namun untuk dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah yang tersebar memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah agar tidak menimbulkan opini liar di tengah masyarakat.

Selanjutnya untuk menjawab tujuan penyebaran informasi SPPIP maupun RPKPP maka dilakukan wawancara dengan informan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang mengatakan bahwa:

“Tujuannya yaitu dapat menjawab kebutuhan penyelesaian persoalan pembangunan pemukiman dan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung integrasi antara perencanaan pembangunan dan penataan ruang khusus di ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu”

(Hasil wawancara tanggal, 8 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tujuan dari penyebaran informasi SPPIP maupun RPKPP adalah menjawab kebutuhan penyelesaian persoalan pembangunan pemukiman dan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung integrasi antara perencanaan pembangunan dan penataan ruang khusus di ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu hal inilah yang menjadi dasar penting dilakukan penyebaran informasi.

Selanjutnya untuk mengetahui siapa saja yang mendapatkan akses dan jumlahnya maka dilakukan wawancara dengan informan Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang mengemukakan bahwa:

“Ada beberapa petugas yang dapat membagi informasi yaitu antara lain Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembina teknis kegiatan (PPK) yang di dalamnya langsung menerima dan menjalankan tugas langsung dari kepala dinas sesuai aturan yang berlaku menurut mentri PUPR”

Hasil wawancara tanggal, 10 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa petugas yang bertugas membagikan informasi yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembina teknis kegiatan (PPK) yang menerima dan menjalankan tugas dari kepala Dinas hal ini disesuaikan dengan aturan PUPR. Kemudian untuk mengetahui siapa saja orang yang mengendalikan akun informasi dikemukakan oleh informan Staf Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam yang mengatakan bahwa:

“yah orang yang mengendalikan akun informasi ada satu orang yang bertanggung jawab dalam pengendalian akun informasi yang bersifat online yaitu programmer dari keuangan dan dibantu oleh operator bidang yang menguasai IT”

(Hasil wawancara tanggal, 4 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat satu orang yang bertanggung jawab dalam pengendalian akun informasi yang dilakukan secara online yaitu programmer dari keuangan yang memperoleh skill, dan penguasaan IT yang baik.

Harus ada pemeriksaan rutin atas informasi apa yang dipertahankan, pemangkasan data lama akan mengurangi biaya yang diperlukan untuk menyimpannya dan menghapus atau mengarsipkan konten setelah habis masa pakainya juga harus didorong.

1. **Bersih (Clean)**

Harus ada pemeriksaan rutin atas informasi apa yang dipertahankan, pemangkasan data lama akan mengurangi biaya yang diperlukan untuk menyimpannya dan menghapus atau mengarsipkan konten setelah habis masa pakainya juga harus didorong. Untuk memperoleh informasi tersebut maka dilakukan wawancara dengan informan Staf Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam yang mengatakan bahwa:

“Selama ini website atau aplikasi yang di gunakan hanya perlu di upgrade atau di perbarui setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan oleh pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan informasi tentang SPPIP maupun RPKPP”

(Hasil wawancara tanggal, 4 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk informasi SPPIP maupun RPKPP dilakukan di upgrade atau di perbarui setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapat informasi SPPIP maupun RPKPP melalui informasi online. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Sub Bagian Perencanaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang mengemukakan bahwa:

“Adanya pemeriksaan ketika adanya potensi dan permasalahan pembangunan pemukiman dan infrastruktur oleh pihak terkait. Tidak adanya pembatasan informasi mengenai RKPP dan RPKPP selagi dokumen penyelenggaraannya sesuai dengan Aturan yang berlaku menurut Kementerian pekerjaan umum”

(Hasil wawancara tanggal, 10 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada pemeriksaan rutin yang dilakukan yang bertujuan untuk mencegah potensi dan permasalahan pembangunan pemukiman dan infrastruktur oleh pihak terkait. Disamping itu informasi yang disampaikan pada masyarakat harus Bersih (Clean) dalam artian menyampaikan sesuatu secara transparan dan tidak disembunyikan dan Tidak ada pembatasan informasi mengenai RKPP dan RPKPP selama dokumen penyelenggaraannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

1. **Kontrol (Control)**

Pembatasan akses ke alat yang tidak disetujui dan hentikan penyalinan konten yang tidak terkontrol saat karyawan menyimpan file ke layanan sinkronisasi file pribadi yang perlu diawasi. Untuk memperoleh informasi mengenai hal tersebut maka dilakukan wawancara dengan informan Kepala Sub Bagian Perencanaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang mengemukakan bahwa:

“pembatasan akses tidak dilakukan semua orang tentu bisa mengakses namun jika tidak sesuai tidak sesuai dengan dokumen maka perlu dilakukan penarikan konten dari website atau ada keselahan begitu kita bisa lakukan perubahan”

(Hasil wawancara tanggal, 4 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembatasan akses informasi tidak dilakukan kepada siapa pun semua dapat mengakses namun untuk kesalahan konten atau ada ketidaksesuaian informasi dapat dilakukan perubahan konten dan ini tidak perlu membutuhkan persetujuan secara formal karena yang diupload adalah dokumen yang sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang mengatakan bahwa:

“Penyusunan SPPIP dan RPKPP harus sesuai dengan karakteristiknya berpotensi pada penanganan kawasan pemukiman yang dilakukan secara logis bertahap sesuai kebutuhan yang perlukan pemerintah daerah dan juga yang ingin diketahui masyarakat”

(Hasil wawancara tanggal, 8 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses penyusunan SPPIP dan RPKPP dilakukan dengan penyesuaian kebutuhan pemerintahan yang berdasar pada karakteristik potensi dan penanganan kawasan pemukiman secara logis. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang mengatakan bahwa:

“Ada SOP nya ya kalau itu dan sebenarnya pengawasan pun dianggap kurang kalau pemahaman dari individu, dan SDM yang rendah Di batasi oleh media informasi yang sangat minim pada daerah terpencil seperti Kabupaten Mahakam Ulu ini saya pikir yang menjadi kendala”

(Hasil wawancara tanggal, 10 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa

Terdapat SOP yang berlaku dalam Unit Kerja badan/dinas lingkup pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman penyusunan standar operasional prosedur agar dilakukan dengan baik dan benar yang terdapat dalam peraturan mentri Negara pendayagunaan aparatur Negara nomor: PERI21M.PAN/I 112008 tentang pedoman penyusunan Standar Operating Procedures (SOP).

Control yang diberikan tidak dapat berlaku secara efektif karena pemahaman individu atau kapasitas SDM masih rendah kemudian dibatasi oleh media informasi yang sangat minim pada daerah terpencil seperti Kabupaten Mahakam Ulu oleh karena itu peningkatan infrastruktur informasi mesti ditingkatkan dan pengembangan kapasitas SDM perlu ditingkatkan untuk mendukung Good Information Governance.

*Good Information Governance* adalah strategi di balik manajemen yang efektif dari otoritas informasi, kontrol, aksesibilitas, dan visibilitas di seluruh siklus hidup informasi. Selain itu, tata kelola informasi membawa nilai lebih besar bagi organisasi karena dapat mengungkap peluang serta melindungi mereka dari ancaman keamanan (Hampton, 2016).

Secara keseluruhan Good Information Governance dibidang Keciptakaryaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu berjalan dengan sejumlah kekurangan dan dapat dikatakan belum optimal hal ini ditandai dengan hasil penelitian yang menunjukkan sistem informasi manajemen Keciptakaryaan Kabupaten Mahakam Ulu masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki khususnya manajemen yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan dari SDM khususnya yang bekerja pada bidang keciptakaryaan. Audit dilakukan untuk kepentingan pengetahuan mengenai kesesuaian antara laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di daerah.

Selanjutnya pada indikator prioritaskan (prioritise) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap adanya risiko dimulai dari perencanaan awal suatu proyek dapat di rencanakan sesuai dengan kebutuhan daerah hal ini bertujuan agar terjadi pemerataan dalam pembangunan dan menghindari risiko konflik yang dapat muncul.

Risiko peraturan yang dibuat dapat mengharuskan setiap program yang dirumuskan termasuk SPPIP dan RPKPP mempertimbangkan peraturan kebijakan dan strategi yang terdapat di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJMD dan RTRW. Ada reputasi daerah yang dipertaruhkan apabila setiap informasi SPPIP maupun RPKPP tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan persoalan di daerah tentu akan mencerminkan kelemahan manajemen informasi yang ditangani pemerintah daerah.

Selanjutnya pada indikator penentuan (define) menunjukkan bahwa hal yang diperhatikan terkait penentuan (*define*) adalah segala hal yang perlu dijaga adalah dokumen yang bersifat rahasia namun untuk dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah yang tersebar memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah agar tidak menimbulkan opini liar di tengah masyarakat. Tujuan dari penyebaran informasi SPPIP maupun RPKPP adalah menjawab kebutuhan penyelesaian persoalan pembangunan pemukiman dan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung integrasi antara perencanaan pembangunan dan penataan ruang khusus di ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu hal inilah yang menjadi dasar penting dilakukan penyebaran informasi. terdapat beberapa petugas yang bertugas membagikan informasi yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembina teknis kegiatan (PPK) yang menerima dan menjalankan tugas dari kepala Dinas hal ini disesuaikan dengan aturan PUPR.

Terdapat satu orang yang bertanggung jawab dalam pengendalian akun informasi yang dilakukan secara online yaitu programmer dari keuangan yang memperoleh skill, dan penguasaan IT yang baik. Harus ada pemeriksaan rutin atas informasi apa yang dipertahankan, pemangkasan data lama akan mengurangi biaya yang diperlukan untuk menyimpannya dan menghapus atau mengarsipkan konten setelah habis masa pakainya juga harus didorong. Kemudian pada indikator Bersih (Clean) menunjukkan bahwa untuk informasi SPPIP maupun RPKPP dilakukan di upgrade atau di perbarui setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapat informasi SPPIP maupun RPKPP melalui informasi online. Kemudian ada pemeriksaan rutin yang dilakukan yang bertujuan untuk mencegah potensi dan permasalahan pembangunan pemukiman dan infrastruktur oleh pihak terkait. Disamping itu informasi yang disampaikan pada masyarakat harus Bersih (Clean) dalam artian menyampaikan sesuatu secara transparan dan tidak disembunyikan dan Tidak ada pembatasan informasi mengenai RKPP dan RPKPP selama dokumen penyelenggaraannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya pada indikator Kontrol (Control) menunjukkan bahwa pembatasan akses informasi tidak dilakukan kepada siapa pun semua dapat mengakses namun untuk kesalahan konten atau ada ketidaksesuaian informasi dapat dilakukan perubahan konten dan ini tidak perlu membutuhkan persetujuan secara formal karena yang diupload adalah dokumen yang sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah. Proses penyusunan SPPIP dan RPKPP dilakukan dengan penyesuaian kebutuhan pemerintahan yang berdasar pada karakteristik potensi dan penanganan kawasan pemukiman secara logis.

Kontrol yang diberikan tidak dapat berlaku secara efektif karena pemahaman individu atau kapasitas SDM masih rendah kemudian dibatasi oleh media informasi yang sangat minim pada daerah terpencil seperti Kabupaten Mahakam Ulu oleh karena itu peningkatan infrastruktur informasi mesti ditingkatkan dan pengembangan kapasitas SDM perlu ditingkatkan untuk mendukung Good Information Governance.

**V. PENUTUP**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

Secara keseluruhan *Good Information Governance* dibidang Keciptakaryaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu berjalan dengan sejumlah kekurangan dan dapat dikatakan belum optimal hal ini ditandai dengan hasil penelitian yang menunjukkan sistem informasi manajemen Keciptakaryaan Kabupaten Mahakam Ulu masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki khususnya manajemen yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan dari SDM khususnya yang bekerja pada bidang keciptakaryaan. Kepatuhan terhadap adanya risiko dimulai dari perencanaan awal suatu proyek dapat di rencanakan sesuai dengan kebutuhan daerah hal ini bertujuan agar terjadi pemerataan dalam pembangunan dan menghindari risiko konflik yang dapat muncul. Tujuan dari penyebaran informasi SPPIP maupun RPKPP adalah menjawab kebutuhan penyelesaian persoalan pembangunan pemukiman dan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung integrasi antara perencanaan pembangunan dan penataan ruang khusus di ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu hal inilah yang menjadi dasar penting dilakukan penyebaran informasi. terdapat beberapa petugas yang bertugas membagikan informasi yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembina teknis kegiatan (PPK) yang menerima dan menjalankan tugas dari kepala Dinas hal ini disesuaikan dengan aturan PUPR. Harus ada pemeriksaan rutin atas informasi apa yang dipertahankan, pemangkasan data lama akan mengurangi biaya yang diperlukan untuk menyimpannya dan menghapus atau mengarsipkan konten setelah habis masa pakainya juga harus didorong. Kemudian pada indikator Bersih (Clean) menunjukkan bahwa untuk informasi SPPIP maupun RPKPP dilakukan di upgrade atau di perbarui setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapat informasi SPPIP maupun RPKPP melalui informasi online. Kemudian ada pemeriksaan rutin yang dilakukan yang bertujuan untuk mencegah potensi dan permasalahan pembangunan pemukiman dan infrastruktur oleh pihak terkait. Kemudian kontrol yang diberikan tidak dapat berlaku secara efektif karena pemahaman individu atau kapasitas SDM masih rendah kemudian dibatasi oleh media informasi yang sangat minim pada daerah terpencil seperti Kabupaten Mahakam Ulu oleh karena itu peningkatan infrastruktur informasi mesti ditingkatkan dan pengembangan kapasitas SDM perlu ditingkatkan untuk mendukung Good Information Governance.

* 1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan di atas, maka sebagai saran terkhusus kepada pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas SDM aparatur yang bekerja pada Dinas PUPR Kabupaten Mahakam Ulu perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan atau pembekalan mengenai teknologi informasi lengkap dengan manajemen pengelolaan informasi.
2. Keperluan untuk memperbarui informasi setiap tahunnya mesti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat untuk mendapat informasi SPPIP maupun RPKPP Kabupaten Mahakam Ulu yang transparan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anggadini, Dewi. S. (2013). Analisis sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam proses pengambilan keputusan. Majalah Ilmiah UNIKOM.

Bennie, B. (2013). Model Of Infrastructure Information System On Cipta Karya Division. Jurnal Teknologi Berkelanjutan, 2(01), 40-49.

Djunaidi, E. (2017). Implementasi Pembangunan Jalan Lingkungan Masyarakat Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota Samarinda. Jurnal Paradigma (JP), 3(1), 26-36.

Halimah Tusyakdiah, N. (2015). Pemanfaatan Digital Library Politeknik Negeri Sriwijaya Sebagai Sumber Referensi Dalam Penyusunan Laporan Akhir (Studi Kasus pada Mahasiswa Semester VI Prodi Administrasi Bisnis Polsri), Politeknik Negeri Sriwijaya.

Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Hartono, B. (2013). Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer. Jakarta: Rineka Cipta.

Husein, Muhammad Fakhri dan Amin Wibowo. (2012). Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Ibrahim, W. H., & Maita, I. (2017). Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar. Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi, 3(2), 17-22.

Irawan, Agus. (2016). Sistem Informasi Perdagangan Pada PT Yoltran Sari Menggunakan Php Berbasis Web. POSITIF: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi, 1(2).

Irmayani, W. (2016). Perancangan Strategis Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Jurnal Informatika dan Sistem Informasi, 2(1), 16-25.

[Joseph Dunne-Howrie](https://blogs.city.ac.uk/citylis/author/sbrb031/%22%20%5Co%20%22View%20all%20posts%20by%20Joseph%20Dunne-Howrie). (2019). Is information governance essential for good information management?. Library & Information Science at City, University of London.

Kusuma, I. J., Jamal, M., & Linggi, R. K. (2018). Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pelaksanaan Pembangunan Stadion Batakan Di Kota Balikpapan. eJournal Ilmu Pemerintahan , 2018, 6 (3).

Ladjamudin, Al Bahra Bin. (2005). Analisis dan Desain Sistem Informasi, Jogjakarta: Graha Ilmu.

Laudon, Kenneth C. & Laudon, Jane P..( 2005). Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Lipursari, A. (2013). Peran sistem informasi manajemen (SIM) dalam pengambilan keputusan. Jurnal Stie Semarang, 5(1), 26-37.

Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.

O'Brien, James A. (2010). Sistem Informasi Manajemen Perspektif Bisnis dan Managerial. Jakarta: Salemba Empat.

# [Paul Hampton](https://www.itproportal.com/author/paul-hampton/) (2016). How to implement good information governance. ITProPortal.

Scott, G. M. (2001). Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen, diterjemahkan oleh Achmad Nashir Budiman. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.

Sumarna Putera, D., Mulyati, M., & Elizabeth, T. (2016) Sistem Informasi Kepegawaian Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang Baturaja. STMIK MDP